

Praktik Politik Nepotisme dalam Pemilihan Walikota

Political Nepotism Practices in Election Mayor

Rachman Sidharta Arisandi
Universitas Islam Majapahit
rachman.arisandy@unim.ac.id
sandyrseai@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini memusatkan perhatian pada berbagai bentuk nepotisme politik dalam pemilihan walikota. Penelitian teori grounded diadopsi sebagai pendekatan yang sesuai dengan tujuan penelitian, yakni untuk menghasilkan model teoritis pada nepotisme politik dan perlawanan masyarakat. Perilaku aktor politik utama telah membentuk jaringan politik nepotisme daerah, dengan ciri praktik-praktik koersif dan hegemonik, konspirasi dan oligarki. Perilaku demikian mengakibatkan disafeksi politik temporer, yang ditandai dengan rasa ketidakberdayaan, ketidaktertarikan, ketidakpercayaan, ketidakpedulian, keterasingan, dan sinisme terhadap aktor-aktor politik, partai politik, lembaga-lembaga politik serta proses politik lokal. Ada tiga ranah tujuan yang hendak dicapai oleh nepos dan nepotis, yaitu: meningkatkan popularitas Nepos, mendapatkan legalitas Nepos, dan meningkatkan elektabilitas Nepos. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa praktik nepotisme politik, baik untuk meningkatkan popularitas, mendapatkan legalitas dan meningkatkan elektabilitas, mengakibatkan berbagai bentuk perlawanan masyarakat, mulai dari stigmatisasi negatif, berbagai bentuk perlawanan simbolik, transaksionalisasi dukungan dan suara, dan akhirnya perlawanan elektoral yang tercermin dalam ketidakmauan memberikan suara bagi aktor.

Kata Kunci: Prilaku Politik Lokal, Jejaring Politik, Politik Nepotisme Daerah, Politik Disafeksi Masyarakat, Penolakan Elektoral Masyarakat.

Abstract

This study focuses on the various forms of political nepotism in mayoral election. Grounded-theory research adopted as the approach in accordance with the objective of the study, that is to generate a theoretical model on the political nepotism and people's electoral resistance. The main political actors' behavior have formed local political networks of nepotism, which is characterized by the practices of coercive and hegemonic power; conspiracy and oligarchy. Such behaviors resulted in a temporary political disaffection, which is characterized by the sense of helplessness, lack of interest in, distrust, ignorance, alienation and cynicism towards political actors, political parties, political institutions as well as the local political process. There are three domains of interest of political nepotism that the nepos and nepotis wanted to achieve, namely: increasing nepos' popularity, getting nepos' legality, and improving nepos' electability. The study also concludes that the practice of local political nepotism, both to increase the popularity, to get legality, as well as to improve electability, lead to some forms of community resistance, ranging from negative stigmatization, various symbolic resistances, transactionalization of support and votes and finally electoral resistance reflected in the unwillingness to vote for the actors.

Key words: Local political behavior, political network, local political nepotism, people's political disaffection, people's electoral resistance.

PENDAHULUAN

Tidak ada yang bisa memungkiri, setelah reformasi politik (1998) atau pasca orde baru, maka, kehidupan demokrasi di Indonesia mengalami perubahan sangat mencolok. Perubahan tersebut tidak hanya menyangkut perundang-undangan partai politik, Pemilu Legislatif, dan Pemilihan Presiden, akan tetapi, juga menyangkut pemilihan bupati, walikota dan gubernur.

Sejatinya, pemilihan walikota atau bupati melalui pemungutan suara rakyat secara langsung, dimaksudkan untuk: (1) meningkatkan peran warga masyarakat dalam rekrutmen walikota atau bupati, (2) memperoleh walikota atau bupati dengan legitimasi lebih tinggi, dan (3) mengurangi peluang terjadinya praktik politik uang dalam pemilihan walikota atau bupati.

Kajian pendahuluan terhadap pemilihan walikota atau bupati menunjukkan kecenderungan peningkatan korupsi politik yang mencakup praktik politik uang (*money politics*), politik dinasti (*dynastic politics*), politik pertemanan (*crony politics*), dan politik nepotisme (*nepotistic politics*). Jika praktik politik uang sudah menggejala ketika walikota atau bupati dipilih secara tidak langsung oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selama masa orde baru, maka, praktik politik pertemanan, terlebih politik dinasti dan politik nepotisme kian mengemuka ketika pemilihan walikota atau bupati dipilih secara langsung melalui pemilihan umum daerah.

Akibat praktik politik nepotisme bisa ditemukan, misalnya, dalam waktu bersamaan seorang suami menjadi bupati di suatu daerah, sedangkan isterinya menjadi bupati di daerah lain --- atau, seorang bupati yang sudah menjabat dua periode kemudian digantikan oleh putra kandungnya --- bahkan, seorang bupati yang sudah menjabat dua periode, kemudian digantikan oleh isterinya.

Selaras dengan yang tersebut di atas, banyak calon walikota atau bupati yang mempunyai hubungan keluarga, baik berdasarkan keturunan (*consanguinity*) maupun karena hubungan perkawinan (*affinity*). Di antara mereka, ada yang berhasil memenangkan pemilihan umum daerah dan disahkan menjadi walikota atau bupati. Fenomena praktik nepotisme politik dalam pemilihan walikota atau bupati ini penting

diteliti, karena, praktik korupsi politik tidak hanya bertentangan dengan norma hukum dan etika politik, akan tetapi, juga bertentangan dengan asas-asas demokrasi dan meritokrasi.

Dalam penelitian ini, ada tiga pertanyaan utama yang diajukan, yakni bagaimana para aktor individual dan kolektiva membangun dan menggunakan jejaring untuk praktik politik nepotisme di daerahnya, kemudian, bagaimana para aktor individual dan kolektiva melakukan praktik politik nepotisme daerah, serta, bagaimana warga masyarakat menunjukkan perlawanan terhadap praktik politik nepotisme di daerahnya.

Sebagaimana diketahui, meski politik nepotisme telah menggejala dalam pemilihan walikota atau bupati, namun, belum ada penelitian spesifik yang memusatkan perhatian pada praktik politik nepotisme dalam pemilihan walikota atau bupati, khususnya di Indonesia.

Dalam konteks Indonesia, pemilihan walikota atau bupati secara langsung telah memunculkan fenomena baru berupa patronase politik yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi modern. Mengingat, patronase politik bisa terjadi antara seseorang yang menyediakan modal baik finansial maupun sosial pada calon walikota atau bupati dan calon wakil walikota atau bupati. Sementara, politik dinasti terjadi antara seseorang yang memegang jabatan politik daerah yang dengan kewenangan dan sumberdaya yang dimilikinya mendukung salah satu anggota keluarga atau kerabat untuk menjadi walikota atau bupati. Sementara, nepotisme politik terjadi antara seseorang yang memegang jabatan politik daerah menyalahgunakan kewenangan dan sumberdaya publik yang dipercayakan kepadanya untuk mendukung salah satu anggota keluarga atau kerabat untuk menjadi walikota atau bupati.

Sebagaimana ditelaah oleh Skinner (Skinner, 2006), korupsi adalah perilaku menyimpang dari tugas resmi suatu peran publik yang terjadi karena pengaruh hubungan pribadi, seperti hubungan keluarga, keluarga dekat, dan kelompok pribadi yang memberikan keuntungan berupa uang atau kedudukan; atau melanggar aturan pelaksanaan yang memberikan pengaruh bagi orang yang memiliki beberapa macam hubungan pribadi. Korupsi mencakup pula perilaku penyuaian, favoritisme karena hubungan

keluarga atau pertemanan, dan penyelewengan berupa perampasan secara tidak sah sumberdaya publik untuk kepentingan pribadi maupun orang lain yang memiliki hubungan pribadi dengan pejabat publik.

Mengacu kepada konsep tersebut, maka, praktik pengistimewaan dan atau penyalahgunaan kewenangan dan sumberdaya publik untuk seseorang atau lebih yang memiliki hubungan pribadi dengan pejabat publik termasuk salah satu bentuk korupsi politik. Secara lebih khusus, korupsi politik demikian disebut nepotisme politik. Selain praktik pengistimewaan seseorang atau lebih yang memiliki hubungan pribadi dengan pejabat publik, dalam praktik nepotisme politik seorang pejabat publik juga menyalah-gunakan sumberdaya publik yang dipercayakan kepadanya untuk kepentingan seseorang atau lebih yang memiliki hubungan pribadi dengan pejabat public berhasil mendapatkan jabatan publik.

Praktik politik patronase bisa berlangsung baik antar anggota keluarga maupun tidak. Politik dinasti, misalnya, merupakan bentuk politik patronase khusus yang melibatkan orang tua dengan anaknya, sedang politik nepotisme menunjuk pada politik patronase yang melibatkan seorang pejabat politik dengan satu atau lebih anggota keluarganya. Konsep politik nepotisme memiliki cakupan lebih luas, karena mencakup tiga level ke atas dan tiga level ke bawah dari hubungan keluarga, sebagaimana dengan lebih mudah dicermati berdasarkan bagan yang disajikan oleh Departemen Pengadilan Kriminal Texas (*Texas Department of Criminal Justice*, 2010). Secara etika, baik politik patronase, politik dinasti, maupun politik nepotisme dinilai bertentangan dengan tujuan ideal demokrasi modern, karena, praktik mementingkan keluarga dan kerabat di banyak negara biasanya berujung pada tumbuhnya dinasti politik yang memacu nepotisme dan korupsi ekonomi serta politik (Agustiono, 2010).

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif-interpretif (A. Strauss, 1987), serta *grounded-theory research* (A. Strauss and J. Corbin, 1990).

Jejaring dan Aktor-Aktor Politik Daerah

Berdasarkan ranah tujuan tindakan aktor individu nepotis dan nepos, terdapat tiga organisasi spasial dalam jejaring politik nepotisme daerah, yaitu: organisasi spasial popularitas, organisasi spasial legalitas, dan organisasi spasial elektabilitas. Adapun, aktor utama dalam ketiga organisasi spasial tersebut ditandai oleh derajat sentralitasnya dalam jejaring, yakni aktor individu nepotis atau walikota yang masih menjabat, dan selanjutnya aktor individu nepos yang tidak lain adalah isteri walikota yang masih menjabat.

Dalam organisasi spasial popularitas, kontribusi terbesar diberikan oleh aktor individu H.M. Shofwan selaku Sekretaris Kota Malang, yang membawahi sejumlah Dinas-dinas daerah, Kantor-kantor Daerah, Badan-badan Daerah, dan lain-lain yang merupakan bagian dari aktor kolektiva perangkat daerah. Hampir semua dinas atau kantor daerah berpotensi dimobilisasi oleh aktor individu H.M. Shofwan untuk membantu popularitas isteri walikota yang masih menjabat sebagai aktor nepos. Kontribusi aktor individu H.M. Shofwan sendiri tidak dapat dipisahkan dari hubungan transaksional yang berlangsung antara walikota dan isteri walikota. Ketika konstelasi politik belum banyak berubah, sebenarnya, H.M. Shofwan direncanakan mendampingi isteri walikota, untuk maju sebagai calon wakil walikota.

Kontribusi terbesar kedua diberikan oleh aktor kolektiva organisasi non-pemerintah yang dibentuk pemerintah (NGOGO), dengan anggota paling dominan Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Malang, Kecamatan, hingga Kelurahan. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, organisasi PKK dengan efektif bisa digunakan oleh isteri walikota untuk mempopulerkan dirinya, baik melalui berbagai program di seluruh wilayah kota, melalui kerjasama dengan aktor kolektiva perangkat daerah, maupun melalui bantuan dan kontribusi transaksional dengan aktor kolektiva media massa.

Selain sejumlah aktor tersebut, dalam ranah popularitas, isteri walikota juga sangat terbantu oleh kedudukannya sebagai bendahara Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP) Kota Malang, yang sekaligus isteri Ketua DPC PDIP Kota Malang. Dengan memanfaatkan kedudukan ini pula, maka, aktor

nepotis dan aktor nepos berhasil merekayasa keputusan semua Pengurus Anak Cabang (PAC) PDIP untuk menetakannya sebagai calon tunggal walikota dari DPC PDIP Kota Malang. Walau akhirnya isteri walikota gagal mendapatkan rekomendasi dari DPP PDIP, namun, tidak diragukan lagi bahwa nama isteri walikota ini sudah sangat terkenal di kalangan anggota PDIP Kota.

Dalam organisasi spasial legalitas, kontribusi terbesar diberikan oleh aktor individu H. Nawu, yang berhasil mempengaruhi aktor individu Sofyan Edi Jarwoko dan aktor kolektiva DPRD Partai Golkar untuk menjadi calon wakil walikota mendampingi aktor individu isteri walikota sebagai calon walikota. Kenyataan ini merupakan kontribusi terbesar dalam organisasi spasial legalitas, karena, di DPRD, Partai Golkar memiliki 5 kursi. Selanjutnya, kontribusi terbesar kedua diberikan oleh aktor kolektiva Partai Amanat Nasional (PAN) yang tidak mencalonkan anggota partainya sendiri, akan tetapi, justru memberikan dukungan sepenuhnya kepada isteri walikota sebagai calon walikota. Sementara itu, peran KPU berlangsung sebagaimana mestinya, dengan sedikit kemudahan karena dikabarkan bahwa berkas pendaftaran pasangan calon Heri Pudji Utami dan Sofyan Edi Jarwoko terkesan dilakukan dalam situasi serba mendesak, berupa tulisan tangan untuk nama calon wakil walikota.

Dalam organisasi spasial elektabilitas, semua aktor dalam organisasi spasial popularitas, kecuali PDIP secara organisatoris, tetap memberikan kontribusinya bagi pasangan Heri Pudji Utami dan Sofyan Edi Jarwoko. Kontribusi terpenting yang memberikan Heri Pudji Utami memiliki nilai tawar tinggi berasal dari PAN yang memiliki 4 kursi DPRD kota. Kontribusi tambahan diberikan oleh aktor kolektiva Partai Golkar kota, aktor kolektiva PPP, partai-partai non-parlemen, para loyalis Peni Suparto dan Heri Pudji Utami, serta aktor Rendra Kresna dan secara tidak langsung aktor kolektiva Partai Golkar Kabupaten.

Berkait dengan yang tersebut di atas, dengan memperhatikan jejaring politik nepotisme yang digunakan oleh para aktor, khususnya Peni Suparto (Walikota), Heri Pudji Utami (isteri walikota), H.M. Shofwan (Sekretaris Kota), Subur Triono (Bendahara DPD PAN kota), Loh

Mahfudz (Ketua DPD PAN kota), H. Nawu (pengusaha berpengaruh), Rendra Kresna (Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten) dan Sofyan Edi Jarwoko (Ketua DPD Partai Golkar kota), maka, sangat tampak, jika perilaku politik elit dalam jejaring politik nepotisme daerah ini berciri koersif, hegemonik, konspiratif dan oligarkis.

Fenomena perilaku elit politik daerah dalam jejaring yang berciri koersif, hegemonik, konspiratif dan oligarkhis tersebut, secara beriringan diikuti oleh disafeksi politik masyarakat yang dicirikan oleh ketidak-tertarikan, ketidak-percayaan, dan ketidak-pedulian masyarakat daerah penelitian terhadap segala hal yang berkaitan dengan perpolitikan daerah, serta perasaan tidak-berdaya dalam menghadapi perilaku elit politik, perasaan terasing dan sikap sinis terhadap segala hal yang berkaitan dengan politik daerah.

Sejatinya, tidak bisa dipastikan bahwa disafeksi politik massa timbul karena perilaku politik elit dalam jejaring nepotisme politik daerah. Namun demikian, berdasarkan prinsip-prinsip penarikan kesimpulan secara induktif, khususnya metode persamaan (*method of agreement*) dan metode variasi seiring (*method of concomitant variation*), patut diduga, bahwa disafeksi politik massa yang dalam penelitian ini tampak bersifat sementara (*temporary*) karena disebabkan oleh perilaku elit politik dalam jejaring nepotisme politik daerah.

Menurut metode persamaan, bila ada dua atau lebih kejadian yang sedang diteliti memiliki satu faktor yang sama, sementara, faktor yang sama tersebut ditemukan pada semua kejadian, maka, kejadian tersebut merupakan penyebab (atau akibat) dari gejala yang diteliti. Sementara, menurut metode variasi seiring (*method of concomitant variation*), apa pun fenomena yang bervariasi secara seiring dengan cara tertentu, maka, antara kedua fenomena tersebut terjalin hubungan faktual sebab akibat (Rosidi, 2002).

Secara empirik fenomena perilaku elit politik daerah dalam jejaring yang berciri koersif, hegemonik, konspiratif dan oligarkhis dalam penelitian ini secara beriringan diikuti oleh disafeksi politik masyarakat. Karena itu, dengan mengacu pada metode persamaan dan metode variasi seiring, diduga kuat, jejaring

politik nepotisme daerah yang terdiri dari para elit politik daerah berperilaku koersif, hegemonik, konspiratif dan oligarkis telah menyumbang bagi terjadinya ketidak-tertarikan, ketidak-percayaan, dan ketidak-pedulian, perasaan tidak-berdaya menghadapi perilaku politik elit, perasaan terasing dan sikap sinis masyarakat terhadap segala hal yang berkaitan dengan politik daerah. Dengan kata lain, jejaring politik nepotisme daerah yang koersif, hegemonik, konspiratif dan oligarkis telah mengakibatkan gejala disafeksi politik temporer.

Sifat temporer dari gejala disafeksi politik massa tersebut dapat diidentifikasi, terutama, setelah masa jabatan aktor utama politik nepotisme daerah berakhir sehingga memungkinkan warga masyarakat untuk melakukan perlawanan tidak hanya bersifat simbolik sebagaimana perlawanan rakyat dalam jejaring politik yang bersifat koersif, hegemonik, konspiratif dan oligarkis, melainkan, perlawanan nyata melalui penolakan untuk memilih siapa pun calon yang dikehendaki oleh aktor utama politik nepotisme daerah. Perlawanan melalui penolakan memberikan suara untuk calon walikota hasil politik nepotisme ini pula yang akan dibahas lebih lanjut dan dikonsepsikan sebagai perlawanan elektoral.

Berbagai Taktik untuk Popularitas, Legalitas, dan Elektabilitas Nepos

Melalui sejumlah siasat, Peni Suparto berupaya meningkatkan popularitas Heri Pudji Utami, baik melalui jalur internal partai maupun eksternal partai. Pada internal partai PDIP, upaya yang dilakukan adalah: (1) pengangkatan isteri sendiri (nepos) sebagai fungsionaris DPC PDIP Kota Malang, (2) merekayasa susunan kepengurusan PAC PDIP dengan orang-orang yang sejalan dengan kehendaknya, dan (3) merekayasa Musyawarah Kerja DPC PDIP Kota Malang hingga secara bulat mendukung isterinya, Heri Pudji Utami sebagai calon walikota dari PDIP Kota Malang.

Pada eksternal partai, upaya yang dilakukan oleh Peni Suparto adalah: (1) memanfaatkan NGOGO sebagai sarana meningkatkan popularitas Heri Pudji Utami, (2) mewakili perannya sebagai Walikota Malang kepada Heri Pudji Utami dalam berbagai acara seremonial kedinasan, mengekspose atau menampilkan

serta menyampaikan pada publik apa yang telah dilakukan Heri Pudji Utami, (3) melakukan mutasi pejabat di instansi-instansi strategis, baik dalam arti yang paling banyak bersentuhan dengan masyarakat maupun yang paling memberikan kontribusi bagi pendanaan kampanye.

Setelah berhasil mendapatkan dukungan dari hasil Musyawarah Kerja (Musker) PAC sebagai calon walikota, maka, Peni Suparto berusaha unjuk kekuatan dukungan baik melalui hasil survai, mengerahkan massa pada saat pendaftaran bakal cawalikota di DPC PDIP Kota Malang, menekan DPD Jawa Timur dengan mengajukan mosi tidak percaya bersama sejumlah pengurus DPC PDIP di Jawa Timur, membangun “kantor baru” DPC PDIP Kota Malang agar isterinya mendapat rekomendasi dari DPP PDIP. Akan tetapi, upaya tersebut mengalami kegagalan.

Karena sudah tidak memungkinkan lagi untuk mencalonkan diri sebagai calon perseorangan atau yang lebih dikenal dengan calon independen, maka, Peni Suparto menegosiasi DPD PAN Kota Malang agar bisa mencalonkan isterinya. Lewat pengaturan yang dilakukan oleh H. Nawu, seorang pengusaha properti yang memiliki pengaruh besar dalam perpolitikan di Malang, Peni Suparto setuju untuk memasang Heri Pudji Utami dengan Sofyan Edi Jarwoko dari Partai Golkar. Kesediaan Sofyan Edi Jarwoko, yang mengorbankan komunitas pendukungnya (PASMANTEB) yang bersifat lintas partai, disetujui tidak saja oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar yang cenderung pasif, begitu juga oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Jawa Timur. Sedianya, Sofyan Edi Jarwoko akan dipasangkan dengan Muhammad Nur, yang ternyata tidak jadi mencalonkan diri melalui Partai Demokrat karena permintaan Muhammad Nur untuk berpasangan dengan calon dari partai selain Partai Demokrat tidak bisa disetujui oleh DPP dan DPD Partai Demokrat Kota Malang. Oleh karena itu, baik Sofyan Edi Jarwoko maupun Heri Pudji Utami, sama-sama gagal merealisasikan berbagai komitmen politiknya dengan partai-partai lain, sehingga sama-sama tidak memiliki pasangan untuk mencalonkan diri sebagai Walikota atau Bupati Malang pada Pemilihan Umum Kota Malang 2013.

Dengan berbagai cara yang rumit dan

berliku-liku tersebut, akhirnya, Heri Pudji Utami mendapatkan legalitas untuk pencalonan dari DPP PAN dan DPP Golkar karena berpasangan dengan Sofyan Edi Jarwoko. Secara legal formal, dengan dukungan dari PAN dan Partai Golkar, sebenarnya, pasangan Heri Pudji Utami dan Sofyan Edi Jarwoko sudah memenuhi persyaratan untuk pencalonan sebagai pasangan calon Walikota atau Bupati Malang (2013-2018). Oleh karena itu, jika pasangan ini juga melibatkan Asosiasi Partai Non Parlemen (APNP), maka, tujuannya bukan untuk kepentingan legalitas, melainkan untuk peningkatan elektabilitas.

Memperhatikan keadaan demikian, bisa diduga bahwa Heri Pudji Utami tidak bisa lagi mengandalkan suara dari kader dan simpatisan PDIP dan suara dari kader PAN secara penuh. Pada gilirannya, Sofyan Edi Jarwoko mendapatkan penolakan justru dari para relawan dan simpatisan yang semula bergabung dalam PASMANTEB yang memang menghendaki dirinya untuk mencalonkan sebagai walikota dan bukan wakil Walikota Malang. Sejumlah gejala ini perlu dikemukakan, karena diduga akan berhubungan dengan strategi peningkatan elektabilitas dan hasil akhir atau perolehan suara pasangan Heri Pudji Utami dan Sofyan Edi Jarwoko.

Di sisi lain, Peni Suparto melakukan sejumlah siasat untuk meningkatkan elektabilitas isterinya dengan melakukan sejumlah siasat antara lain: (1) Membayar Media Massa Lokal, (2) Mengatur PKK agar Terkesan Hebat, (3) Mobilisasi Lembaga dan Organisasi Masyarakat, (4) Mobilisasi Lurah, Kepala Dusun, Ketua RW dan Ketua RT, (5) Membentuk Tim Sukses dari Tokoh Berpengaruh, (6) Menyelenggarakan Mutasi Pejabat di Instansi-Instansi Strategis, (7) Mobilisasi Elit Politik Lokal dan Nasional, dan (8) Mengambil Cuti untuk Memimpin Tim Sukses.

Siasat membayar media massa lokal tidak hanya dalam bentuk iklan dengan ukuran sangat besar, hingga sehalaman penuh berwarna, dalam bentuk advertorial atau iklan yang ditayangkan menyerupai berita, serta membentuk pemberitaan yang isinya sejalan dengan iklan dan advertorial. Siasat berikutnya adalah menggunakan PKK sebagai kendaraan politik dengan cara membuat seolah-olah PKK Kota Malang senantiasa menampilkan Ketua TP PKK-nya, Heri Pudji

Utami, sebagai sosok yang bisa menjadikan PKK begitu hebat bukan hanya di tingkat nasional, namun juga internasional.

Sejumlah siasat memang tidak dapat digolongkan sebagai bentuk praktik politik nepotisme, akan tetapi, tetap saja dapat digolongkan sebagai siasat untuk mensukseskan seorang calon walikota hasil dari praktik politik nepotisme. Karena itu, bila sebuah tindakan bisa dinilai berdasarkan tujuan dan cara, maka, meski cara yang dilakukan tidak melanggar norma dan etika, namun, apabila dilakukan untuk mencapai tujuan yang melanggar norma dan etika --- maka cara tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan etik.

Dari semua siasat tersebut, secara permukaan memang tidak senantiasa merupakan pelanggaran hukum, akan tetapi, merupakan pelanggaran etika profesional. Sebagai contoh, siasat membayar media cetak dan elektronik untuk meningkatkan elektabilitas, dari satu sisi bisa dipandang sebagai semata-mata hubungan bisnis, dalam arti memasang iklan dan advertorial. Namun demikian, bila sudah menyangkut pemberitaan yang tidak objektif atas suatu kejadian atau pernyataan, sudah bisa dikategorikan sebagai pelanggaran etika profesi jurnalistik.

Sebuah catatan khusus perlu diberikan terhadap siasat memutasi pejabat instansi strategis. Sebagaimana data lapangan menunjukkan, sebagai kegiatan transaksional, ternyata, beberapa pejabat instansi Pemerintah Daerah justru melakukan tindakan yang bisa dikategorikan melanggar peraturan perundang-undangan. Di antara tindakan yang bisa dikategorikan sebagai pelanggaran tersebut antara lain, penggunaan lembaga pendidikan sebagai tempat dan sasaran berkampanye yang justru diprakarsai oleh kepala sekolah --- juga bisa ditemukan seorang lurah yang atas biaya sendiri melakukan praktik politik uang dengan memberikan amplop berisi uang kepada warga masyarakat agar memilih pasangan calon yang dikehendaki oleh walikota.

Perlawanan Masyarakat terhadap Praktik Politik Nepotisme

Berbagai praktik politik nepotisme, baik untuk mendapatkan popularitas, legalitas, maupun elektabilitas secara bersama-sama, baik

langsung maupun tidak langsung mengakibatkan munculnya: (1) Stigmatisasi Negatif terhadap Pelaku Politik Nepotisme, (2) Resistensi Simbolik terhadap Pelaku Politik Nepotisme, (3) Dukungan Bersifat Transaksional bagi Pelaku Politik Nepotisme, dan akhirnya (4) Elektabilitas Rendah bagi Pelaku Politik Nepotisme. Wujud akhir dari perlawanan terhadap praktik politik nepotisme adalah penolakan untuk memberikan suara secara sukarela terhadap pasangan calon hasil nepotisme, sehingga, meski secara permukaan tampak luar biasa dan menimbulkan optimisme untuk menang dalam satu putaran, ternyata, justru kalah secara telak dalam pemilihan umum daerah Kota Malang.

Bila dikaitkan dengan seluruh uraian sebelumnya, bisa disimpulkan bahwa selaku nepotis, Peni Suparto berhasil mengantar Heri Pudji Utami selaku nepos, berhasil tidak hanya pada tingkat peningkatan popularitas, akan tetapi, juga memperoleh legalitas. Namun demikian, berbagai strategi yang diwarnai praktik politik nepotisme serta rekam jejak Peni Suparto sebagai walikota dua periode, telah mengakibatkan perlawanan simbolik dan berujung pada perlawanan elektoral. Sebagian besar warga Kota Malang tidak menghendaki pengulangan gaya pemerintahan Peni Suparto, dan lebih-lebih lagi tidak menghendaki praktik politik nepotisme berhasil di Kota Malang.

Praktik Politik Nepotisme dalam Tiga Ranah Pemilihan Kepala Daerah

Berdasarkan ranah tujuan tindakan aktor individu nepotis dan nepos, terdapat tiga organisasi spasial dalam jejaring politik nepotisme daerah, yaitu: organisasi spasial popularitas, organisasi spasial legalitas, dan organisasi spasial elektabilitas. Dalam ketiga organisasi spasial tersebut, aktor utamanya ditandai dengan derajat sentralitasnya dalam jejaring, yakni aktor individu nepotis atau walikota yang masih menjabat, dan aktor individu nepos yang tidak lain adalah isteri walikota yang masih menjabat.

Dalam organisasi spasial popularitas, kontribusi terbesar diberikan oleh aktor individu Sofwan selaku Sekretaris Kota, yang membawahi sejumlah SKPD, berupa Dinas-dinas daerah, Kantor-kantor Daerah, Badan-badan Daerah, dan lain-lain yang merupakan bagian dari aktor

kolektiva perangkat daerah. Hampir semua SKPD berpotensi dimobilisasi oleh aktor individu Sofwan untuk membantu popularitas isteri walikota yang masih menjabat sebagai aktor nepos. Kontribusi aktor individu Sofwan sendiri tidak dapat dipisahkan dari hubungan transaksional yang berlangsung antara walikota dan isteri walikota. Ketika konstelasi politik belum banyak berubah, sebenarnya, Sofwan direncanakan mendampingi isteri walikota untuk maju sebagai calon wakil walikota.

Kontribusi terbesar kedua diberikan oleh aktor kolektiva NGOGO dengan anggotanya yang paling dominan TP PKK Kota, Kecamatan, hingga Kelurahan. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, organisasi PKK dengan efektif bisa digunakan oleh isteri walikota untuk mempopulerkan dirinya, baik melalui berbagai program di seluruh wilayah kota, melalui kerja sama dengan aktor kolektiva perangkat daerah, maupun melalui bantuan dan kontribusi transaksional dengan aktor kolektiva media massa.

Selain sejumlah aktor tersebut, dalam ranah popularitas, isteri walikota juga sangat terbantu oleh kedudukannya sebagai bendahara DPC PDIP Kota Malang, yang sekaligus isteri Ketua DPC PDIP Kota Malang. Dengan memanfaatkan kedudukan ini pula, maka, aktor nepotis dan aktor nepos berhasil merekayasa keputusan semua PAC PDIP untuk menetapkannya sebagai calon tunggal walikota dari DPC PDIP Kota Malang. Walau akhirnya isteri walikota ini gagal mendapatkan rekomendasi dari DPP PDIP, namun, tidak diragukan lagi bahwa nama isteri walikota ini sudah sangat terkenal di kalangan anggota PDIP Kota Malang.

Dalam organisasi spasial legalitas, kontribusi terbesar diberikan oleh aktor individu H. Nawi yang berhasil mempengaruhi aktor individu Sofyan Edi Jarwoko dan aktor kolektiva DPRD Partai Golkar untuk menjadi calon wakil walikota mendampingi aktor individu isteri walikota sebagai calon walikota. Hal ini merupakan kontribusi terbesar dalam organisasi spasial legalitas, karena di DPRD, Partai Golkar memiliki 5 kursi. Sementara, kontribusi terbesar kedua diberikan oleh aktor kolektiva Partai Amanat Nasional (PAN) yang tidak mencalonkan anggota partainya sendiri, namun, memberikan dukungan

sepenuhnya kepada isteri walikota sebagai calon walikota. Selanjutnya, peran KPU berlangsung sebagaimana mestinya dengan sedikit kemudahan karena dikabarkan bahwa berkas pendaftaran pasangan calon Heri Pudji Utami dan Sofyan Edi Jarwoko terkesan dilakukan dalam situasi serba mendesak, berupa tulisan tangan untuk nama calon wakil walikota.

Dalam organisasi spasial elektabilitas, semua aktor dalam organisasi spasial popularitas, kecuali PDIP, secara organisatoris tetap memberikan kontribusinya bagi pasangan Heri Pudji Utami dan Sofyan Edi Jarwoko. Kontribusi terpenting yang memberikan Heri Pudji Utami memiliki nilai tawar tinggi, berasal dari PAN yang memiliki 4 kursi di DPRD kota. Kontribusi tambahan diberikan oleh aktor kolektiva Partai Golkar kota, aktor kolektiva PPP, partai-partai non-parlemen, para loyalis Peni Suparto dan Heri Pudji Utami, serta aktor Rendra Kresna dan secara tidak langsung aktor kolektiva Partai Golkar Kabupaten Malang.

Memperhatikan jejaring politik nepotisme daerah yang digunakan oleh para aktor, khususnya Peni Suparto (Walikota), Heri Pudji Utami (isteri Walikota), H.M. Shofwan (Sekretaris Kota), Subur Triono (Bendahara DPD PAN kota), Lokh Mahfudz (Ketua DPD PAN kota), H. Nawi (pengusaha berpengaruh), dan Sofyan Edi Jarwoko (Ketua DPD Partai Golkar kota), sangat tampak, bahwa perilaku elit politik dalam jejaring politik nepotisme daerah ini berciri koersif, hegemonik, konspiratif dan oligarkis.

Ada beberapa ciri perilaku politik aktor individu nepotis dan nepos bersama sejumlah aktor politik lain, baik aktor individu maupun kolektiva yang membentuk jejaring politik nepotisme daerah. Beberapa ciri perilaku politik elit yang paling menonjol adalah sifat koersif, hegemonik, konspiratif dan oligarkis dari perilaku mereka. Aktor nepotis, misalnya, tidak segan-segan menggunakan kekerasan yang bahkan menimbulkan semacam perasaan traumatik bagi para aktivis yang berupaya melakukan kritik atau perlawanan terhadapnya. Demikian juga melalui sejumlah strategi, aktor nepotis juga berhasil membangun kekuasaan hegemonik terutama tidak hanya bagian terbesar dari perangkat daerah dan pegawai pemerintah daerah, akan tetapi, juga

sejumlah organisasi sosial yang merasa berhutang budi kepada aktor nepotis dan nepos.

Adanya aliansi temporer untuk maksud terbatas, baik yang dilakukan oleh aktor individu maupun aktor kolektiva, tanpa pernah, misalnya meminta pendapat masyarakat atau konstituen partai, menunjukkan ciri lain dari perilaku elit politik daerah, yaitu: konspiratif. Pola perilaku konspiratif ini tidak saja dilakukan oleh aktor nepotis dan nepos, akan tetapi, juga oleh aktor-aktor lain yang di antaranya adalah aktor individu yang menjadi calon wakil walikota dari aktor nepos. Aktor individu calon wakil walikota ini bahkan sama sekali meninggalkan sekelompok besar kolektiva yang telah dengan setia dan sukarela mendukungnya untuk menjadi calon walikota. Tidak ada, misalnya, upaya dari aktor calon wakil walikota untuk meminta persetujuan dulu kepada perwakilan kolektiva pendukungnya mengenai keputusannya untuk berkoalisi dengan aktor nepos. Justru, sebaliknya, aktor calon wakil walikota ini sibuk mencari rekomendasi dan dukungan dari elit politik pusat dan kemudian elit *brokerage* yang akhirnya memasangkannya dengan aktor nepos.

Perilaku elit politik daerah juga bersifat oligarkis, dalam arti terjadi pemusatan kekuasaan pada sekelompok kecil elit politik atau elit yang berpengaruh di daerah. Lebih lanjut, sifat oligarkis ini juga mewujud dalam perilaku politik nepotisme yang bertujuan melestarikan kekuasaan pada sekelompok kecil elit politik yang dikehendaki oleh aktor nepotis, aktor nepos, dan elit-elit daerah lainnya yang bekepentingan sama atau bermaksud mengupayakan kepentingan pribadi dan kelompoknya melalui kerja sama dengan aktor nepotis.

Selanjutnya, gejala perilaku politik elit yang koersif, hegemonik, konspiratif, dan oligarkis tersebut telah diikuti oleh sejumlah gejala disafeksi politik massa, berupa perasaan subjektif berupa ketidak-tertarikan, ketidakpercayaan, ketidak-pedulian, ketidak-berdayaan, keterasingan dan sinisme masyarakat terhadap segala sesuatu yang bersifat politik, termasuk para politisi, proses politik, partai politik, dan pranata demokrasi lainnya, di antaranya penyelenggara dan pengawas pemilihan walikota.

Tidak bisa disimpulkan secara sederhana

bahwa disafeksi politik massa timbul karena perilaku politik elit dalam jejaring nepotisme politik daerah. Namun demikian, berdasarkan prinsip-prinsip penarikan kesimpulan secara induktif, patut diduga bahwa disafeksi politik massa yang dalam penelitian ini tampak bersifat sementara (*temporary*) disebabkan oleh perilaku politik elit dalam jejaring nepotisme politik daerah.

Sifat temporer dari gejala disafeksi politik massa tersebut dapat diidentifikasi, terutama, setelah masa jabatan aktor utama politik nepotisme daerah berakhir sehingga memungkinkan warga masyarakat untuk melakukan perlawanan yang tidak hanya bersifat simbolik sebagaimana perlawanan rakyat dalam jejaring politik yang bersifat koersif, hegemonik, konspiratif dan oligarkis, melainkan perlawanan nyata melalui penolakan untuk memilih siapa pun calon yang dikehendaki oleh aktor utama politik nepotisme daerah. Perlawanan melalui penolakan memberikan suara untuk calon walikota hasil politik nepotisme ini pula yang akan dibahas lebih lanjut dan dikonsepsikan sebagai perlawanan elektoral.

Perilaku pejabat politik nepotis dalam kasus penelitian ini juga telah meninggalkan banyak sekali jejak traumatik khususnya pada kelompok-kelompok kritis sehingga mengakibatkan kelumpuhan kontrol publik. Berbagai kekerasan cenderung digunakan sebagai cara untuk menyelesaikan segala bentuk konflik dan persaingan, sehingga, berakumulasi dan membentuk sebuah kekuatan yang mencekam bagi kelompok-kelompok kritis. Ketika muncul keengganan di kalangan kelompok kritis untuk mengamati dan mengontrol penggunaan kekuasaan, maka, tidak lagi ditemukan kontrol publik yang cukup kuat hingga mampu menghindarkan penyelewengan penggunaan kewenangan publik. Kondisi yang demikian ini berpeluang untuk diwujudkan, terutama, ketika pejabat politik nepotis berkeinginan memperpanjang jangka waktu kekuasaannya melalui praktik politik nepotisme dengan mencalonkan calon pejabat politik nepos sebagai calon walikota.

Ada tiga ranah utama tujuan politik nepotisme dalam pemilihan umum daerah, yaitu: (1) untuk meningkatkan popularitas calon walikota nepos, (2) untuk mendapatkan legalitas

calon walikota nepos, dan (3) untuk meningkatkan elektabilitas calon walikota nepos.

Pertama, pejabat politik nepotis melakukan sejumlah siasat untuk meningkatkan popularitas calon pejabat politik nepos, baik melalui jalur internal partai maupun eksternal partai. Pada internal partai, upaya yang dilakukan adalah: (1) pengangkatan calon pejabat politik nepos sebagai fungsionaris partai, (2) merekayasa susunan kepengurusan partai dengan orang-orang yang sejalan dengan kehendaknya, dan (3) merekayasa rapat-rapat partai hingga secara bulat mendukung calon pejabat politik nepos sebagai calon walikota dari partainya.

Sementara, pada eksternal partai, upaya yang dilakukan oleh pejabat politik nepotis adalah: (1) memanfaatkan NGOGO sebagai sarana peningkatan popularitas calon pejabat politik nepos, (2) mewakili perannya dalam berbagai acara seremonial kedinasan kepada calon pejabat politik nepos, (3) menggunakan badan amal sosial sebagai sarana pengikat hubungan dengan pihak-pihak yang di-putuskan mendapatkan bantuan, (4) melakukan mutasi pejabat di instansi-instansi strategis, baik dalam arti yang paling banyak bersentuhan dengan masyarakat maupun yang paling memberikan kontribusi bagi pendanaan kampanye.

Kedua, kasus penelitian ini menunjukkan perjalanan panjang yang harus ditempuh baik oleh pejabat politik nepotis maupun calon pejabat politik nepos untuk mendapatkan legalitas pencalonan nepos. Setelah berhasil mendapatkan dukungan dari hasil rapat partai terhadap pencalonan nepos, pejabat politik nepotis berusaha unjuk kekuatan dukungan baik melalui hasil survei, mengerahkan massa pada saat pendaftaran bakal cawalikota di kantor partai setempat, menekan jenjang kepengurusan partai di atasnya dengan mengajukan mosi tidak percaya bersama sejumlah pengurus partai, juga membangun “kantor baru” agar calon pejabat politik nepos mendapatkan rekomendasi dari pengurus pusat partai. Akan tetapi, upaya ini mengalami kegagalan.

Karena tidak mungkin lagi menggunakan jalur independen, pejabat politik nepotis menegosiasi partai lain mencalonkan calon pejabat politik nepos, dan meminta tolong “*bandar politik*” agar dicarikan pasangan dari partai lain

untuk memenuhi persyaratan mendaftarkan calon walikota nepos. Akhirnya, nepos yang tidak lain adalah isteri pejabat politik nepotis bisa mendaftar sebagai calon walikota bersama calon wawali dari partai lain.

Lewat pelbagai cara, akhirnya, calon walikota nepos mendapatkan legalitas untuk pencalonan dari dua partai yang memiliki jumlah kursi legislatif yang memenuhi syarat pencalonan. Memperhatikan keadaan yang sedemikian, maka, calon walikota nepos tahu dan tidak bisa lagi mengandalkan suara dari kader dan simpatisan partai yang telah memecatnya secara penuh --- juga tidak bisa mengandalkan suara dari kader partai lain yang mencalonkan secara penuh. Pada gilirannya, pasangan calon pejabat politik nepos mendapatkan penolakan justru dari para relawan dan simpatisan yang semula bergabung dalam organisasi relawan yang semula mendukungnya untuk mencalonkan sebagai walikota, dan bukan Wakil Walikota Malang.

Ketiga, selain melalui pemanfaatan organisasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), pemanfaatan media massa, pemanfaatan lembaga dan organisasi kemasyarakatan, penggunaan sumberdaya pemerintah daerah, pembentukan tim pemenangan dan juru kampanye serta mutasi pejabat daerah yang berada di bawah kewenangannya, pejabat politik nepotis juga mengambil alih kendali strategi pemenangan dengan meninggalkan sementara kewajibannya sebagai walikota. Semua siasat tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan elektabilitas calon walikota nepos dalam pemilihan umum daerah.

Sejumlah siasat memang tidak dapat digolongkan sebagai bentuk praktik politik nepotisme, akan tetapi, tetap saja dapat digolongkan sebagai siasat untuk mensukseskan seorang calon walikota hasil dari praktik politik nepotisme. Karena itu, bila sebuah bisa tindakan dinilai berdasarkan tujuan dan cara, maka, meski apabila dilakukan untuk mencapai tujuan yang melanggar norma dan etika, maka, cara tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan etik.

Berbagai praktik politik nepotisme, baik untuk meningkatkan popularitas, mendapatkan legalitas maupun meningkatkan elektabilitas secara bersama-sama, baik langsung maupun

tidak langsung mengakibatkan munculnya: (1) stigmatisasi negatif terhadap para aktor utama politik nepotisme, (2) resistensi simbolik dan keseharian masyarakat terhadap para aktor utama politik nepotisme, (3) transaksionalisasi dukungan dan suara warga terhadap calon hasil nepotisme, dan akhirnya (4) resistensi elektoral dalam bentuk ketidak-sediaan memilih pasangan calon hasil nepotisme.

Sementara, wujud akhir dari perlawanan terhadap praktik politik nepotisme adalah penolakan untuk memberikan suara secara sukarela terhadap pasangan calon hasil nepotisme, sehingga, meski secara permukaan tampak luar biasa dan menimbulkan optimisme untuk menang dalam satu putaran, ternyata, justru kalah secara telak dalam pemilihan umum daerah. Pergeseran dari perlawanan stigmatisasi negatif, resistensi simbolik, transaksionalisasi dukungan menuju resistensi elektoral berlangsung seiring dengan tingkat toleransi masyarakat terhadap praktik politik nepotisme. Semakin praktik politik nepotisme dalam pemilihan walikota tidak dapat ditoleransi masyarakat, maka, semakin mungkin perlawanan diberikan dalam bentuk resistensi elektoral.

SIMPULAN

Berdasarkan seluruh temuan penelitian dan proposisi yang berhasil dirumuskan, maka, dapat disusun sebuah model teoretik substantif model yang menyerupai sistem sosial. Perilaku para aktor utama politik daerah membentuk jejaring politik nepotisme daerah dengan ciri-ciri praktik kekuasaan yang koersif, hegemonik, konspiratif dan oligarkis, telah mengakibatkan disafeksi politik masyarakat temporer dengan ciri-ciri ketidak-berdayaan, ketidak-tertarikan, ketidak-percayaan, ketidak-pedulian, rasa keterasingan, dan sinisme terhadap para aktor politik, partai politik, pranata politik hingga proses politik daerah.

Secara rinci, penelitian ini menghasilkan simpulan yang dirumuskan secara proposisional, yakni perilaku aktor utama dalam jejaring politik nepotisme daerah yang menunjukkan ciri-ciri praktik kekuasaan koersif, hegemonik, konspiratif, dan oligarkis, sehingga mengakibatkan disafeksi politik temporer masyarakat dengan ciri-ciri

ketidak-berdayaan, ketidak-tertarikan, ketidak-percayaan, ketidak-pedulian, rasa keterasingan, dan sinisme masyarakat terhadap para aktor politik, partai politik, pranata politik hingga proses politik daerah

Selanjutnya, praktik politik nepotisme walikota dimaksudkan untuk mencapai tiga ranah tujuan yang bersifat maju bertahap sejalan proses pemilihan walikota, yaitu: (1) untuk meningkatkan popularitas calon walikota nepos, (2) untuk mendapatkan legalitas popularitas calon walikota nepos, dan (3) untuk meningkatkan elektabilitas popularitas calon walikota nepos.

Kemudian, ranah tujuan praktik politik nepotisme untuk meningkatkan popularitas calon walikota nepos dilakukan dengan: (1) melancarkan siasat internal partai pejabat politik nepotis dan calon pejabat politik nepos, dan (2) melancarkan siasat eksternal partai pejabat politik nepotis dan calon walikota nepos --- kemudian, ranah tujuan praktik politik nepotisme untuk mendapatkan legalitas calon walikota nepos dilakukan dengan melakukan persuasi dan negosiasi keputusan rekomendasi pengurus pusat partai politik sehingga walikota selaku nepotis dan calon walikota nepos menjadi anggota dan atau pengurus partai politik.

Selaras dengan yang tersebut di atas, bila legalitas calon walikota nepos melalui rekomendasi pengurus pusat partai gagal diperoleh, maka, walikota nepotis dan calon walikota nepos mengupayakan dengan menjalin hubungan transaksional dengan beberapa partai tertentu yang akan mencalonkan nepos, dan partai lain yang mengajukan pasangan calon bagi nepos --- sementara, ranah tujuan praktik politik nepotisme untuk meningkatkan elektabilitas calon walikota nepos dilakukan oleh para aktor utama, khususnya walikota sebagai nepotis, dengan sejumlah tindakan penyalahgunaan kewenangan terhadap sumberdaya publik dan aneka tindakan koruptif lainnya --- kemudian, praktik politik nepotisme daerah, baik untuk meningkatkan popularitas, mendapatkan legalitas, maupun meningkatkan elektabilitas oleh para aktor utama, baik secara langsung maupun tidak langsung, mengakibatkan sejumlah bentuk perlawanan masyarakat yang bergeser menurut tingkat toleransi masyarakat, mulai dari: (1) berbagai stigmatisasi negatif terhadap perilaku politik nepotis dan nepos, (2)

berbagai bentuk resistensi simbolik dan keseharian masyarakat, (3) transaksionalisasi dukungan dan suara oleh warga masyarakat kepada calon walikota nepos, dan akhirnya akhirnya (4) resistensi elektoral dalam bentuk ketidak-sediaan memilih calon walikota nepos dalam pemilihan walikota.

Kepustakaan

- Agustino, L. 2010. *Dinasti Politik Pasca Otonomi Orde Baru: Pengalaman Banten*, dalam *Prisma*, Volume 29, Juli 2010, Jakarta: LP3ES.
- Rosidi, S., 2002. *The History of Modern Thought*, Malang: Center for Interdisciplinary Study and Cooperation (CISC).
- Skinner, R. M. 2006. *Political and Governmental Corruption*. Borgota and Montgomery, *Encyclopedia of Sociology*. New York: MacMillan.
- Strauss A. and Corbin J. 1990. *Grounded Theory Research: Procedures, Canons and Evaluative Criteria*, Second Edition edition, California: SAGE Publications, Inc.
- Strauss, A. 1987. *Qualitative Analysis for Social Scientists*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Texas Department of Criminal Justice, 2010. *Nepotism Chart*. <https://www.tdcj.state.tx.us/divisions/hr/hr-policy/pd-26a.pdf>



SEKOLAH PASCASARJANA ILMU POLITIK
Universitas Nasional